

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Oleh Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Adeng Okmulya Putra¹ Ema Fitri Lubis²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No.133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
adeng79@student.uir.ac.id emafitrilubis@soc.uir.ac.id

Received :11 Juni 2025

Abstract

this study aims to evaluate the implementation of the Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Control Program at Simpang Tiga Public Health Center, Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. Based on the research findings, the DHF control program is considered "moderately achieved" as not all indicators have been implemented optimally. The program's primary goal is to reduce the number of DHF cases through prevention education and mosquito breeding site eradication. Success has been achieved through increased community awareness of environmental cleanliness, supported by adequate budget allocation for activities such as fogging and abate distribution. The increase in the number and qualifications of medical personnel has been one of the positive achievements, although the lack of medical staff in the past hindered the program's effectiveness. The program's benefits have been felt by the community in the form of DHF prevention, improved awareness of hygiene, and enhanced quality of life. Active community participation, such as maintaining environmental cleanliness through mutual cooperation, has significantly contributed to the program's success.

Keywords: Program evaluation, DHF control, Simpang Tiga Public Health Center, community participation, program effectiveness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Puskesmas Simpang Tiga, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, program pengendalian DBD dinilai "cukup tercapai" karena belum semua indikatornya terlaksana dengan baik. Program ini memiliki target utama menurunkan jumlah kasus DBD melalui edukasi pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk. Keberhasilan dicapai melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, didukung alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan seperti fogging dan distribusi abate. Peningkatan jumlah dan kualifikasi tenaga medis menjadi salah satu pencapaian positif, meskipun masih terdapat kendala kekurangan tenaga medis di masa lalu yang memengaruhi efektivitas program. Manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pencegahan penyebaran DBD, peningkatan kesadaran akan kebersihan, dan perbaikan kualitas hidup. Peran aktif masyarakat, seperti menjaga kebersihan lingkungan melalui gotong royong, sangat berkontribusi terhadap keberhasilan program. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat dan pihak kesehatan melalui penyuluhan, edukasi, dan penyelidikan epidemiologi memperkuat efektivitas program.

Kata kunci: Evaluasi program, pengendalian DBD, Puskesmas Simpang Tiga, partisipasi masyarakat, efektivitas program.

Pendahuluan

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat secara global, khususnya di negara-negara tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk

Aedes aegypti dan *Aedes albopictus* yang terinfeksi. Meskipun upaya-upaya pengendalian telah dilakukan, angka kasus DBD terus meningkat setiap tahunnya, menyebabkan beban kesehatan yang signifikan bagi masyarakat.

DBD dapat terjadi sepanjang tahun dan dapat menginfeksi semua kelompok umur, khususnya anak-anak usia sekolah. Anak-anak usia sekolah, menurut definisi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), adalah mereka yang berusia antara 7-15 tahun, sementara di Indonesia, anak usia sekolah biasanya berusia antara 6-12 tahun. Pada usia ini, biasanya konsep kesehatan mulai diperkenalkan di sekolah. Hampir setiap sekolah sudah memiliki Program Kesehatan Sekolah (PKS), yang bertujuan untuk membentuk dan mempromosikan gaya hidup sehat kepada siswa secara menyeluruh dan terpadu. Anak-anak usia sekolah sering menghabiskan waktu di ruangan sekolah dari pagi hingga sore, sehingga tempat tersebut merupakan area dengan risiko tinggi terhadap penularan penyakit ini.

Gejala DBD dapat bervariasi dari ringan hingga berat, termasuk demam tinggi, nyeri otot dan sendi, sakit kepala parah (terkadang disebut "demam breakbone"), ruam, mual, muntah, serta pendarahan dari gusi dan hidung. Pada kasus yang parah, DBD dapat berkembang menjadi demam berdarah dengue yang mematikan, yang ditandai dengan penurunan jumlah trombosit dan peningkatan risiko perdarahan serius

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, kejadian dengue terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2016. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, artinya jumlah kasus dengue meningkat. Urbanisasi, perubahan iklim, mobilisasi penduduk yang semakin tinggi merupakan faktor yang turut berpengaruh pada situasi ini, selain perilaku masyarakat dan variasi dalam implementasi program. Pada periode tahun 2020-2022, terlihat pola yang sangat fluktuatif, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mungkin terpengaruh oleh situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Apalagi gejala awal penyakit dengue dan Covid-19 memiliki kemiripan. Meningkatnya kejadian dengue dari tahun ke tahun, tidak diikuti dengan pola angka kematian yang meningkat. Angka kematian akibat dengue yang semula setinggi 41,3% pada awal ditemukannya penyakit ini (1968) telah menurun drastis menjadi <1% sejak tahun 2008 hingga sekarang.

Tinjauan Pustaka

Menurut Van Meter Van Horn dalam Julianda dan Eko Handrian 2022: 8 mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-masing variabel merupakan faktor signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.

Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Pelaksanaan adalah pergerakan yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. (Nawawi, 2008)

Pelaksanaan menurut (Wesra, 2011) adalah sebagai usaha- usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksanaan adalah bahwa sumber daya pelaksanaan yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. (Adisasmita, 2011).

Impelementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

(Solihin, 2004) mengatakan Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian impelementasi kebijakan yakni timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat;/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Model implementasi yang berperspektif top down dikemukakan oleh George C. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect impact on impelementation. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu (Agustino, 2008) :

1. Komunikasi, komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public, impelementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik.
2. Sumber daya, mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, dalam mengimpelemntasikan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu, staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Diposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik.
4. Struktur Birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan I mplementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama

banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Dalam pendekatan yang menggunakan teori dari Van Metter dan Carl Van Horn Implementasi kebijakan publik mengatakan proses implementasi kebijakan sebuah abstraksi atau performansi suatu Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja Implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia pelaksana dan kinerja kebijakan public yang dimana terdapat enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi atau pelaksanaan, yaitu (1) Standar Dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap/Kecendrungan, (5) Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana, (6) Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial.

Yang dimana indikator Variabel Pelaksanaan yang sangat menentukan keberhasilan Pelaksanaan, yaitu :

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang, merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implemementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sumber daya sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan oganisasi informal yang akanterlibat pengimpelementasikan kebijakan publik, merupakan sangat penting karena kinerja implemementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tetap serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana sangat mejadi pengaruh keberhasilan atau tindak kinerja implementasi kebijakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implemementasi, maka asumsinya kesalahan- kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan, Ekonomi,Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna meninal kinerja implementasi public dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Carl Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Metode

Tipe penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi, berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan melalui pengumpulan data dan menganalisa, sehingga dapat mengevaluasi dan mendapatkan hasil dalam permasalahan penelitian ini.

Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif bertujuan untuk menghubungkan antar variabel dalam sebuah populasi dikarenakan hal tersebut, peneliti berkeinginan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan fakta dilapangan yang dapat diukur dan dari data diperoleh peneliti dapat melakukan analisis terhadap hipotesis dari penelitian ini sehingga hasil dari penelitian ini akan teruji secara ilmiah dan empiric, dengan hasil akhir yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2:

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Puskesmas Simpang Tiga mengenai berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Pada Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Marpoyan Damai

No	Indikator	RESPONDEN			
		T	CT	KT	Jumlah
1	Efektivitas	7 (23%)	13,5 (50%)	9,5 (33%)	30 (100%)

2	Efisiensi	9,5 (33%)	13,5 (43%)	7 (23%)	30 (100%)
3	Kecukupan	7 (23%)	12 (40%)	9 (32%)	30 (100%)
4	Pemerataan	9,5 (33%)	13,5 (43%)	7 (23%)	30 (100%)
5	Responsivitas	9,5 (33%)	13,5 (43%)	7 (23%)	30 (100%)
Jumlah		42,5	66	39,5	150
Rata-rata		8,5	13,5	7,9	30
Persentase		28,5 %	45,5 %	26%	
Skala Pengukuran		34-66%			
Kriteria		Cukup Tercapai			

Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan bahwa rata-rata jawaban responden “Cukup Tercapai”

Indikator efektifitas berdasarkan hasil wawancara bahwa Program pengendalian DBD di Puskesmas Simpang Tiga, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, memiliki target utama yang jelas, yaitu menurunkan jumlah kasus DBD melalui pencegahan berbasis edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk. Upaya yang dilakukan pihak Puskesmas, seperti pemberian edukasi kepada masyarakat, telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan DBD, sehingga terjadi perubahan perilaku.

Indikator Efisiensi dari sisi sumber daya manusia (SDM), terdapat perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, tenaga medis yang menangani kasus DBD terbatas, dengan tugas bidang Kesling (Kesehatan Lingkungan) dirangkap oleh tenaga bidang Epidemiologi. Hal ini menjadi kendala dalam penanganan optimal. Pada tahun ini, jumlah tenaga medis dan petugas pendukung sudah mencukupi, sehingga pembagian tugas lebih jelas dan efektif.

Indikator kecukupan Secara keseluruhan, baik dari segi anggaran maupun SDM, kondisi pada tahun ini menunjukkan perbaikan yang mendukung terlaksananya program pengendalian DBD dengan lebih baik. Hal ini memberikan optimisme terhadap hasil wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa Kurangnya tenaga medis dalam program pengendalian DBD dapat menyebabkan penggunaan sarana dan prasarana yang tidak optimal, penurunan kualitas pelaksanaan program, dan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa jumlah tenaga medis yang terlibat cukup, terlatih, dan dapat menjalankan peran mereka dengan baik untuk mendukung efektivitas program pengendalian DBD secara keseluruhan.

Indikator Pemerataan program pengendalian DBD memberikan manfaat yang signifikan dalam mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta memperbaiki kualitas hidup secara umum. Dengan adanya program ini, masyarakat merasa lebih terlindungi dari ancaman DBD, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Indikator Responsivitas bahwa keberhasilan program pengendalian DBD sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam mendukung pencegahan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengingat bahwa fogging dari dinas hanya efektif untuk membunuh nyamuk dewasa, sementara nyamuk muda tetap dapat berkembang biak di lingkungan yang kotor. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk berperan dalam mengurangi tempat-tempat berkembang biaknya nyamuk dengan membersihkan lingkungan secara rutin.

Selain itu, pihak puskesmas juga memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan DBD, serta melakukan penyelidikan epidemiologi jika ada kasus. Hasil penyelidikan ini akan dilaporkan ke dinas kesehatan, yang kemudian dapat memutuskan untuk melakukan fogging di daerah yang terjangkit kasus. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pihak kesehatan, program pengendalian DBD dapat lebih efektif dan mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Pada Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Marpoyan Damai kota pekanbaru., maka dapat disimpulkan hasil penelitian Program Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) “cukup tercapai “dijelaskan sebagai berikut :

Pada Indikator Efektivitas Program pengendalian DBD di Puskesmas memiliki target jelas untuk menurunkan kasus DBD melalui pencegahan berbasis edukasi dan pemberantasan sarang nyamuk. Upaya edukasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kemudian mengarah pada perubahan perilaku dalam pencegahan DBD, dari hasil penelitiannya indikator ini masuk kedalam kategori “Cukup tercapai”

Dalam Indikator efesiensi ini menunjukkan perbaikan signifikan dari sisi SDM. Tahun ini, jumlah tenaga medis dan petugas pendukung mencukupi, mengatasi kendala tahun sebelumnya, di mana tenaga medis terbatas dan tugas Kesling dirangkap dengan

Epidemiologi. Hal ini membuat pembagian tugas lebih jelas dan penanganan DBD lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini termasuk kategori “ Cukup Tercapai”

Sedangkan indikator kecukupan menunjukkan perbaikan pada anggaran dan SDM tahun ini, mendukung pelaksanaan program pengendalian DBD yang lebih baik. Kurangnya tenaga medis sebelumnya dapat menyebabkan penggunaan sarana tidak optimal dan penurunan kualitas program. Oleh karena itu, memastikan jumlah tenaga medis yang cukup dan terlatih sangat penting untuk mendukung efektivitas program secara keseluruhan, dari data penelitian tersebut menunjukkan indikator ini termasuk dalam kategori “ Kurang Tercapai”

Kemudian indikator pemertaan menunjukkan bahwa program pengendalian DBD memberikan manfaat signifikan dalam mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, serta memperbaiki kualitas hidup. Program ini membuat masyarakat merasa lebih terlindungi dari ancaman DBD, yang berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dari penjelasan tersebut indikator ini masuk dalam kategori “ Cukup tercapai”

Selanjutnya indikator Responsivitas menunjukkan bahwa keberhasilan program pengendalian DBD sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam pencegahan. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam gotong royong menjaga kebersihan, karena fogging hanya efektif untuk membunuh nyamuk dewasa, sementara nyamuk muda berkembang biak di lingkungan kotor. Puskesmas juga memberikan edukasi dan melakukan penyelidikan epidemiologi jika ada kasus, yang hasilnya dilaporkan ke dinas kesehatan untuk tindakan fogging. Dari hasil penelitian peneliti di lapangan indikator ini juga termasuk dalam kategori “cukup tercapai” karena belum semua item pertanyaannya yang diajukan peneliti memenuhi kategori tercapai.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, penerbit: Alfabeta, Bandung Bungin, Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Medi Group. Jakarta.
- Dr. H Indra Muchlis Adnan, S. d. (2013). *ADMINISTRASI, ORGANISASI, DAN MANAJEMEN*. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Trussmedia Grafika.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya . Hetzer, E. (2012). *Central and Regional Government*. Jakarta: Gramedia.
- Isro' Lailia, K. A. (2021). PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTERVENSI GIZI SENSITIF DI KOTA SEMARANG. 1- 10.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada MEDIA Group.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.

- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejatan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group

- Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In

Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer

International Publishing.

- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government

in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau

Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD: "Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Lina Marliani, M. (2018). DEFINISI ADMINISTRASI DALAM BERBAGAI SUDUT PANDANG. *Vol 5, No 4*, 17-1
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Retno Sunu Astuti, H. W. (2020). *Collaborative Governance (dalam Perspektif Administrasi Publik)*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrum, S. &. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citrapustaka Media.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1*, 1-10.
- Fitri, L. (2018). HUBUNGAN BBLR DAN ASI EKSLUSIF DENGAN KEJADIAN STUNTING DI PUSKESMAS LIMA PULUH PEKANBARU. *Jurnal Endurance 3(1)*, 131-137
- Khodziah Isnaini Kholif, I. N. (2014). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN DAWARBLANDONGKABUPATENMOJOKERTO. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4*, 709-714.